

KAJIAN HISTORIS MODEL EKONOMI MELAYU PADA MASYARAKAT KESULTANAN PALEMBANG

Muhammad Husni, Holijah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

E-Mail: muhammadhusniuin@radenfatah.ac.id, holijahuin@radenfatah.ac.id

Abstract: *The Palembang Darussalam Sultanate, established in the 17th century, was one of the important political and cultural entities in South Sumatra. As part of the Malay-Islamic civilization, its economic system reflected a synthesis of Islamic values and local practices. This study attempts to explore the economic characteristics of Malay society during the sultanate as a form of historical study that reflects the economic identity of the archipelago. This study reviews the economic dynamics of Malay society in the context of the Palembang Darussalam Sultanate. With a historical approach and cultural analysis, this article examines the structure, values, and mechanisms of traditional economics based on Islamic norms and local wisdom. The findings show that the Malay economic model in the Palembang Darussalam Sultanate society is a system built on the foundation of Islamic values and local customs that strengthen each other. This system not only prioritizes economic efficiency, but also upholds ethics, distributive justice, and social solidarity. With a structure that involves the active role of the sultan, ulama, and indigenous people, the Palembang Sultanate succeeded in forming an economic ecosystem that is oriented towards shared prosperity. Economic activities such as trade, agriculture, waqf management, and zakat distribution are managed in an integrated manner and reflect sharia principles that are inseparable from local wisdom. Even when faced with the pressures of colonialism and global change, this economic system was able to demonstrate its resilience and flexibility through adaptation that maintained its cultural and spiritual character.*

Keywords: *Malay Economy, Palembang Sultanate, Economic History.*

Abstrak: Kesultanan Palembang Darussalam, yang berdiri pada abad ke-17, merupakan salah satu entitas politik dan budaya penting di Sumatera Selatan. Sebagai bagian dari peradaban Melayu-Islam, sistem ekonominya mencerminkan sintesis antara nilai-nilai keislaman dan praktik lokal. Penelitian ini berupaya menggali karakteristik ekonomi masyarakat Melayu pada masa kesultanan sebagai bentuk kajian historis yang mencerminkan identitas ekonomi nusantara. Penelitian ini mengulas dinamika ekonomi masyarakat Melayu dalam konteks Kesultanan Palembang Darussalam. Dengan pendekatan historis dan analisis budaya, artikel ini menelaah struktur, nilai-nilai, dan mekanisme ekonomi tradisional yang berbasis pada norma Islam serta kearifan lokal. Temuan menunjukkan bahwa Model ekonomi Melayu pada masyarakat Kesultanan Palembang Darussalam merupakan

sistem yang terbangun atas fondasi nilai-nilai Islam dan adat istiadat lokal yang saling menguatkan. Sistem ini tidak hanya mengedepankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi etika, keadilan distributif, dan solidaritas sosial. Dengan struktur yang melibatkan peran aktif sultan, ulama, serta masyarakat adat, Kesultanan Palembang berhasil membentuk ekosistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, pengelolaan wakaf, serta distribusi zakat dikelola secara terintegrasi dan mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang tidak terlepas dari kearifan lokal. Bahkan ketika dihadapkan pada tekanan kolonialisme dan perubahan global, sistem ekonomi ini mampu menunjukkan daya tahan dan fleksibilitasnya melalui adaptasi yang tetap mempertahankan karakter budaya dan spiritualnya.

Kata Kunci: Ekonomi Melayu, Kesultanan Palembang, Sejarah Ekonomi.

PENDAHULUAN

Kesultanan Palembang Darussalam, sebagai salah satu kerajaan bercorak Islam di wilayah Sumatera Selatan, memegang peran penting dalam pembentukan identitas sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Melayu. Keberadaan kesultanan ini bukan hanya mencerminkan kebesaran politik lokal, tetapi juga menampilkan karakter budaya yang khas, termasuk dalam praktik ekonominya. Sistem ekonomi yang tumbuh dalam masyarakat Kesultanan Palembang tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada nilai-nilai Islam dan adat Melayu yang saling berkaitan.(Azyumardi,2017)

Dalam kajian sejarah ekonomi, penting untuk menelaah bagaimana sistem tradisional masyarakat Melayu tidak hanya berfokus pada mekanisme pasar, tetapi juga memperhatikan prinsip moral, spiritual, dan solidaritas sosial. Konsep keberkahan, keseimbangan, dan distribusi yang adil menjadi prinsip dasar dalam tata kelola ekonomi mereka. Kesultanan Palembang, yang berkembang sejak abad ke-17, telah menjadikan Islam sebagai fondasi dalam mengatur kehidupan ekonomi, mulai dari sistem perdagangan hingga lembaga sosial seperti zakat dan wakaf.

Posisi strategis Palembang di sepanjang Sungai Musi menjadikannya simpul penting dalam jaringan perdagangan regional maupun internasional. Kegiatan dagang yang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Palembang mempertemukan berbagai bangsa seperti Arab, Cina, India, dan Eropa. Interaksi ini

tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berimplikasi pada transformasi budaya dan sistem nilai masyarakat setempat. Model ekonomi yang berkembang menunjukkan fleksibilitas adaptif, di mana unsur lokal dan global saling mempengaruhi dalam kerangka nilai-nilai Islam dan adat.(Leonard,2008)

Meskipun perdagangan menjadi poros utama, sistem ekonomi di Kesultanan Palembang juga ditopang oleh lembaga sosial-keagamaan. Zakat, sebagai kewajiban keuangan umat Islam, dikelola secara kolektif untuk memastikan kesejahteraan kelompok yang rentan. Di samping itu, institusi wakaf berfungsi sebagai sumber dana abadi untuk pendidikan, masjid, dan pelayanan sosial lainnya. Keberadaan baitul mal dan sistem gotong royong menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat Melayu tidak hanya menekankan pada akumulasi, tetapi pada distribusi manfaat secara berkeadilan.

Adat Melayu juga memainkan peran krusial dalam pengaturan kehidupan ekonomi. Hukum adat mengatur kepemilikan lahan, tata niaga, serta penyelesaian sengketa. Nilai-nilai kebersamaan dan kesepakatan komunitas menguatkan integritas sistem tersebut. Dalam masyarakat Palembang, sistem ekonomi tidak terlepas dari struktur sosial yang bersifat kolektif dan hierarkis, di mana peran sultan, ulama, dan pemuka adat saling bersinergi membentuk tatanan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. (Ichwan,2021)

Kajian historis terhadap sistem ekonomi Melayu di Palembang penting dilakukan untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal mampu menciptakan ketahanan ekonomi di tengah tantangan kolonialisme dan perubahan zaman. Dengan menelusuri dinamika ekonomi masa lalu, kita dapat menggali pelajaran berharga tentang bagaimana ekonomi berbasis nilai, etika, dan budaya lokal dapat menjadi alternatif dalam pembangunan ekonomi modern yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode historis dipilih karena objek kajian berupa peristiwa masa lampau yang memerlukan rekonstruksi sistematis berdasarkan

sumber-sumber sejarah yang tersedia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai ekonomi melayu pada masa Kesultanan Palembang melalui interpretasi dan analisis terhadap data-data historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesultanan Palembang Darussalam menjadi salah satu poros penting dalam jaringan ekonomi maritim di kawasan Asia Tenggara pada masa pra-kolonial. Letaknya yang strategis di sepanjang Sungai Musi mempertemukan aliran perdagangan dari pedalaman Sumatera hingga ke lautan lepas, menjadikan Palembang sebagai pelabuhan transit yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai penjuru. Masyarakat Melayu Palembang hidup dalam struktur sosial yang hierarkis namun integratif, di mana sultan berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin spiritual. Struktur ini memberikan dasar legitimasi bagi kebijakan ekonomi yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam dan adat istiadat setempat. (Taufik,1991)

Dalam praktiknya, sistem ekonomi yang berkembang bukan semata didorong oleh logika pasar, tetapi oleh etika komunal dan solidaritas sosial. Setiap aktivitas ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi, memperhatikan aspek kehalalan, keadilan, dan manfaat kolektif bagi masyarakat luas. Sebagai pusat dagang, Palembang dikenal dengan ekspor komoditas unggulan seperti lada, emas, rotan, dan kayu gaharu. Komoditas ini diperdagangkan melalui perahu-perahu dagang milik para saudagar Melayu maupun asing yang singgah di pelabuhan Sungai Musi.

Interaksi perdagangan tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga pertukaran budaya dan penguatan jaringan Islam. Para pedagang dari Timur Tengah turut menyebarkan ajaran Islam sekaligus memperkenalkan praktik-praktik ekonomi syariah yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat lokal. Kesultanan menerapkan regulasi terhadap perdagangan melalui pajak pelabuhan, sistem izin masuk, dan pengawasan terhadap transaksi oleh petugas yang ditunjuk sultan. Regulasi ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan mencegah dominasi kekuatan ekonomi asing secara sepihak. Kegiatan ekonomi masyarakat juga didukung oleh

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lahan pertanian dan hutan dijaga melalui hukum adat, dengan pembagian hak kelola yang berdasarkan pada asas musyawarah dan mufakat. Serta sistem irigasi tradisional serta pengelolaan tambak secara komunal menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Palembang memiliki pengetahuan lokal yang kaya dalam pengelolaan lingkungan dan produksi pangan. (Kernas,2010)

Peranan institusi keagamaan dalam struktur ekonomi sangat menonjol. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pertemuan komunitas, pembinaan ekonomi umat, dan tempat distribusi zakat serta sedekah kepada fakir miskin. Zakat dikelola secara kolektif dengan pengawasan langsung dari pejabat yang ditunjuk sultan. Pendayagunaan zakat difokuskan pada pembiayaan kegiatan sosial dan ekonomi produktif, seperti bantuan alat kerja bagi petani atau modal dagang bagi pedagang kecil. Selain zakat, wakaf menjadi pilar ekonomi spiritual yang menopang fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur keagamaan. Aset wakaf seperti tanah dan bangunan dikelola oleh nadzir yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pihak kesultanan. (Kernas,2010)

Dalam konteks hukum ekonomi, masyarakat Melayu Palembang menganut perpaduan antara syariat Islam dan hukum adat. Misalnya, dalam jual beli, selain ada akad yang sah, terdapat pula prinsip saling percaya dan pantang menipu yang menjadi bagian dari etika dagang Melayu. Kesultanan membentuk lembaga seperti baitul mal untuk menampung dan menyalurkan dana publik. Lembaga ini mengelola dana zakat, sedekah, dan wakaf untuk mendukung proyek-proyek kemasyarakatan dan membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Struktur ekonomi juga didukung oleh sistem sosial berbasis gotong royong, di mana masyarakat saling membantu dalam masa panen, membangun rumah, atau menghadapi bencana. Sistem ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan sosial yang kuat. Dalam hal distribusi hasil pertanian, dikenal praktik maro atau bagi hasil, yang mengatur pembagian keuntungan antara pemilik tanah dan penggarap secara adil. Prinsip keadilan dan kebersamaan menjadi dasar pengelolaan sumber daya tersebut. (Kernas,2010)

Masyarakat Melayu Palembang menempatkan nilai spiritual dalam setiap transaksi. Doa dan salawat sering dibacakan dalam permulaan aktivitas ekonomi, seperti saat membuka ladang atau berdagang, sebagai bentuk permohonan berkah. Pengetahuan lokal tentang musim, arah angin, dan arus sungai juga dijadikan pedoman penting dalam perdagangan dan pelayaran. Ini menunjukkan integrasi antara budaya, ekologi, dan ekonomi yang sangat harmonis. Ekonomi rumah tangga menjadi bagian vital dalam struktur ekonomi masyarakat. Peran perempuan dalam kegiatan seperti menenun, membuat kerajinan, dan menjual hasil kebun turut menggerakkan roda ekonomi lokal secara signifikan. (Sam,2021)

Pendidikan ekonomi berbasis agama dan adat ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Anak-anak diajarkan untuk berhemat, jujur dalam berdagang, serta berbagi kepada yang membutuhkan. Adanya suro atau pasar tradisional yang diadakan secara berkala memperkuat interaksi antar komunitas desa dan memperluas jaringan ekonomi mikro. Pasar ini menjadi wadah pertukaran barang, informasi, dan solidaritas sosial.

Kesultanan Palembang juga memiliki kebijakan fiskal sendiri, seperti penetapan pajak dan pungutan yang bersifat ringan dan tidak memberatkan rakyat. Ini menunjukkan adanya sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi tersebut tetap bertahan meski menghadapi tekanan kolonialisme Belanda yang mulai masuk secara sistematis pada abad ke-18. Strategi ekonomi resistif muncul melalui pembentukan jaringan dagang bawah tanah dan sistem barter. Masyarakat mempertahankan otonomi ekonomi dengan cara menyimpan hasil bumi dan emas dalam jaringan komunitas sendiri, bukan di lembaga kolonial. Hal ini memperlihatkan kecerdikan lokal dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi. (Taufik,1991)

Dalam menghadapi pengaruh asing, kesultanan tetap mengutamakan kelangsungan nilai adat dan agama. Meski teknologi dan sistem dagang modern mulai masuk, masyarakat tetap mempertahankan prinsip ekonomi yang berakar pada kearifan lokal. Islamisasi ekonomi menjadi strategi kultural dan spiritual untuk menguatkan identitas kolektif. Praktek muamalah berbasis syariah diperkuat dalam pengajaran pesantren dan majelis taklim sebagai bagian dari penguatan masyarakat.

Transformasi ekonomi pasca-pembubaran kesultanan tidak serta merta menghapus model ekonomi tradisional. Banyak prinsip ekonomi lama yang terus hidup dalam praktik ekonomi masyarakat desa hingga hari ini. Dalam sejarahnya, model ekonomi Kesultanan Palembang tidak pernah berdiri sebagai sistem kapitalistik yang eksploitatif, melainkan sebagai sistem berbasis nilai yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Kajian sejarah ini menunjukkan bahwa ekonomi Melayu Palembang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan simbolik. Ini merupakan warisan berharga yang layak dikembangkan untuk model ekonomi alternatif di masa kini. Model ini berpotensi dijadikan rujukan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan yang tidak semata mengandalkan pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan merefleksikan sejarah ekonomi Melayu di Kesultanan Palembang, kita tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menyiapkan masa depan ekonomi bangsa yang berakar pada nilai, bukan sekadar angka.

KESIMPULAN

Model ekonomi Melayu pada masyarakat Kesultanan Palembang Darussalam merupakan sistem yang terbangun atas fondasi nilai-nilai Islam dan adat istiadat lokal yang saling menguatkan. Sistem ini tidak hanya mengedepankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi etika, keadilan distributif, dan solidaritas sosial. Dengan struktur yang melibatkan peran aktif sultan, ulama, serta masyarakat adat, Kesultanan Palembang berhasil membentuk ekosistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, pengelolaan wakaf, serta distribusi zakat dikelola secara terintegrasi dan mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang tidak terlepas dari kearifan lokal. Bahkan ketika dihadapkan pada tekanan kolonialisme dan perubahan global, sistem ekonomi ini mampu menunjukkan daya tahan dan fleksibilitasnya melalui adaptasi yang tetap mempertahankan karakter budaya dan spiritualnya. Oleh karena itu, model ekonomi Kesultanan Palembang tidak hanya relevan untuk dipahami dalam

konteks sejarah, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam merancang sistem ekonomi kontemporer yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, model ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Kesultanan Palembang memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu sistem tidak semata ditentukan oleh kekuatan material atau teknologi, melainkan oleh keselarasan antara nilai-nilai budaya, agama, dan struktur sosial yang menopangnya. Dalam konteks kekinian, ketika krisis ketimpangan dan degradasi moral ekonomi semakin meningkat, pendekatan ekonomi berbasis kearifan lokal seperti yang diterapkan di Kesultanan Palembang dapat menjadi alternatif strategis. Ia mengajarkan pentingnya integrasi antara spiritualitas dan produktivitas, antara keberlimpahan dan kepedulian sosial. Dengan menghidupkan kembali semangat kolektif, etos kerja yang jujur, serta sistem distribusi yang adil, warisan ekonomi Melayu Palembang dapat diadaptasi menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi daerah yang berdaya saing namun tetap manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Adat dan Islam: Dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Andaya, Leonard Y. *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hadi, Amirul. *Islam dan Masyarakat Melayu: Studi tentang Peran dan Pengaruh Ulama di Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Ichwan, Sam M. "Sistem Ekonomi Komunitas Melayu." *Jurnal Sosial Budaya* 22, no. 1 (2021): 1–20.
- Kurniawan, Kemas Ridwan. *Adat, Islam dan Kolonialisme di Palembang*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.